

**PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PERAN INSTITUSI
KEMASYARAKATAN DI WILAYAH PESISIR
KECAMATAN TANETE RILAU**

Ernawati S. Kaseng
Email: ernawatisyahrudin71@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) peranan serta tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam penanganan pelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan; 2) mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peranan lembaga masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Proses ini berlangsung dengan memperhatikan prinsip triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang signifikannya peran dari berbagai kelembagaan lokal dalam pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dimana hal ini diiringi tidak terorganisirnya dengan baiknya institusi kemasyarakatan yang ada. Hal ini disebabkan melemahnya kerjasama dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama pada sebahagian besar kegiatan/program institusi kemasyarakatan. Terlihat ada kecenderungan di antara institusi kemasyarakatan yang ada untuk bersifat reaktif semata dalam pelestarian lingkungan ketika akan dilangsungkan perayaan hari besar negara padahal masalah lingkungan sebenarnya perlu dilakukan secara rutin. Semakin berkurangnya program-program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup menyebabkan pula berkurangnya program desa yang terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Institusi Kemasyarakatan, Pelestarian Lingkungan, Wilayah Pesisir

Pendahuluan

Sebagai negara sedang berkembang dengan kekayaan alam yang besar, Indonesia sangat memerlukan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sosial serta berkeadilan dari segi ekonomi. Namun tugas ini tidak mudah. Agenda 21 yang disepakati pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992 dan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, 2002 adalah merupakan sarana penting bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut. Kenyataannya, Agenda 21 Nasional yang berisi rujukan untuk memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional masih belum memuaskan dan masih terkendala pada kurangnya kesadaran publik dan kemauan politik pemerintah untuk melaksanakannya. Selain itu, beberapa ahli menyebutkan akar masalahnya antara lain belum adanya satu persepsi pengelolaan dan kurang koordinasi dalam tata ruang daerah (KLH, 2003).

Untuk itu, pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana penekanan dari Undang-Undang ini adalah pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai bidang pembangunan di Indonesia, seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, dan kehutanan masih menunjukkan terjadinya

degradasi/penurunan kualitas lingkungan. Demikian, bahwa eksploitasi alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan batas toleransinya perlu dicegah sehingga resiko terhadap kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup, umumnya masih dilakukan masyarakat dengan cara yang tidak tepat. Hal ini senantiasa disebabkan adanya dorongan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga pada beberapa titik wilayah pesisir di daerah ini, terlihat hutan mangrove banyak yang dikonversi menjadi tambak, kawasan industri, areal persawahan pasang surut, dan pemukiman. Begitu pula di beberapa titik di wilayah daratan pedesaan, masyarakat yang pada umumnya berani dan berladang melakukan pembukaan lahan tanpa memperhitungkan kerusakan yang diakibatkannya. Kemudian pada beberapa titik wilayah dataran tinggi dilakukan pembukaan wilayah hutan dan digantikan tanaman yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan. Akibatnya terjadi erosi dan lapisan tanah atas yang subur akan hilang dan secara perlahan-lahan akan terjadi lahan kritis. Kerusakan lingkungan tersebut, berdampak pada hilangnya habitat dasar dan fungsinya, dimana kehilangan ini jauh lebih besar dari nilai penggantinya (Dahuri *dkk.*, 2001), dan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah daerah harus menanggung biaya pemulihannya.

Pada sisi lain, semua ketidak pedulian, kesenjangan, kecerobohan dan ketidak tahuan masyarakat pada pelestarian dan pengelolaan lingkungan tersebut diatas menunjukkan kelemahan fundamental struktur kelembagaan masyarakat di daerah ini sebagai wadah partisipasi masyarakat. Sehingga mengindikasikan bahwa berbagai lembaga kemasyarakatan seperti lembaga keagamaan, pemuda, petani dan lain lainnya belum memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap masalah pelestarian dan pengelolaan lingkungan di Sulawesi Selatan dan dampak yang diakibatkan bagi kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih mendalam peranan dan keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat dalam penanganan pelestarian di daerah ini. Serta upaya, strategi, dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan peran lembaga masyarakat tersebut. Masih rendahnya peranan dari lembaga-lembaga masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan diduga karena tidak lengkapnya informasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang sampai pada mereka. Sehingga diduga pula bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah yang menyebabkan partisipasi mereka pada lembaga-lembaga tersebut rendah untuk melakukan pelestarian lingkungan di wilayahnya.

Diharapkan melalui penelitian ini akan ada antisipasi untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menciptakan ekosistem atau lingkungan pesisir yang layak untuk kehidupan dapat dilakukan melalui peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berada di wilayah pesisir sehingga masyarakat sebagai komponen utama penggerak pelestarian lingkungan melalui kelembagaan yang ada di wilayah mereka. Untuk itu, mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut 1) Peranan serta tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam penanganan pelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan; 2) Mengidentifikasi serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peranan lembaga masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan proses dan interpretasi makna dan mengarah pada pengungkapan keadaan atau perilaku individu yang terobservasi secara holistik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara

mendalam atau *in-depth interview*, dengan menggunakan petunjuk wawancara atau daftar pertanyaan, pengamatan berperan. Sedang data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, dan kajian pustaka, serta data yang telah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain, seperti BPS, Kantor kecamatan, Kantor Desa, BPP atau instansi lain yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tahap pertama analisis kualitatif yang dilakukan adalah pereduksian data yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Untuk itu dipilih data yang relevan dengan tema penelitian. Dalam proses pereduksian data dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar dan membuat kerangka dasar penyajian data.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan kumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data yang pada mulanya terpencar dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis dan disajikan dalam bentuk kesatuan tema. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, pada tahap penyajian data dan pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Proses itu menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Untuk itu penelitian ini tidak menguji hipotesis, lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan bagian yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dimana analisa data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif setelah pulang dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah, direduksi dan diabstraksikan sehingga terbentuk satuan informasi yang kemudian ditafsirkan dan diolah akan menjadi kesimpulan.

Pembahasan

Kondisi Lingkungan Di Wilayah Pesisir Lokasi Penelitian

Kondisi pemukiman masyarakat desa Pancana terbagi atas dua wilayah yaitu wilayah poros jalan propinsi dan wilayah pesisir. Pada wilayah poros jalan propinsi, kondisi pemukiman masyarakat di dusun ini tampak sudah tertata, karena hampir semua masyarakat sudah memiliki pagar halaman, baik yang terbuat dari bambu, dan pagar hidup atau bunga. Disisi lain kondisi lingkungan di sebahagian pemukiman masih perlu pembenahan utamanya lingkungan pemukiman yang berada disekitar lahan pertanian dan pinggir sungai sebab jika musim hujan tiba pemukiman dan lahan pertanian terancam banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai, selain kejadian banjir juga dikarenakan oleh saluran/drainase belum lancar. Demikian pula di wilayah pesisir, masih terdapat banyak perumahan masyarakat di bawah standar rumah sehat.

Terkait masalah persoalan peningkatan lingkungan. Untuk wilayah dusun yang berada di sekitar pesisir terlihat masih belum tertata dengan baik, sebahagian besar pemukiman masyarakat yang belum terpelihara. Jenis rumah masyarakat di desa ini yang dominan adalah rumah panggung yang memiliki satu ruang kamar tamu, dan rata-rata dua kamar tidur dan satu ruang dapur, dan terdapat sebahagian kecil rumah masyarakat yang tidak memiliki kamar tidur. Kurangnya pengetahuan lingkungan cukup mempengaruhi dalam memberi pengetahuan terhadap anak-anak mereka. Hal ini terlihat di hampir semua rumah tangga di desa Pancana yang berada di sekitar pesisir pantai yang umumnya membuang limbah cair yang dihasilkan setiap hari dengan cara dibiarkan

mengalir di bawah dapur rumah tangga yang umumnya berumah panggung, tanpa lubang penampungan khusus. Sementara untuk sampah padat umumnya setiap rumah tangga membuangnya di sekitar pekarangan samping atau belakang rumah. Meskipun sudah terdapat MCK yang digunakan membuang hajat bagi masyarakat, namun sarana tersebut masih kurang sehingga untuk kebutuhan buang air besar sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah pesisir Pancana masih memanfaatkan halaman belakang rumah, kebun, pantai, dan bahkan saluran air dengan cara menggali lubang atau tidak sama sekali. Hanya sebahagian kecil saja masyarakat yang sudah memiliki jamban keluarga atau membuat jamban darurat yang dibangun sendiri di rumah masing-masing.

Saat ini di desa Pancana terdapat pelabuhan nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan. Pelabuhan nelayan ini sebenarnya cukup prospektif untuk menambah Pendapatan Asli Desa dan PAD Kabupaten Barru namun pengelolaannya kurang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi bagi kapal-kapal yang membuang limbah minyak solar dan sampah di laut sehingga membuat lingkungan perairan menjadi kotor dan jorok dan suatu saat dapat membahayakan bagi biota laut dan tanaman mangrove yang hidup disekitar wilayah pesisir. Selain itu dapat menyebabkan matinya udang dan ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat desa di areal pertambakan. Hal ini terlihat pula di tempat pelelangan ikan dimana sampah-sampah dibuang ke laut oleh para nelayan dan penjual ikan.

Peran Institusi Kemasyarakatan Dalam Pelestarian Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Tanete Rilau

Dewasa ini sumberdaya alam dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan *over-exploitation* dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Kendati ia secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bias menimbulkan ancaman kerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Dengan adanya institusi kemasyarakatan sebagai kekuatan sumber daya pedesaan seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan guna mengatasi kerusakan yang sering terjadi dan akan terjadi. Sehingga diperlukan sinergisme institusi kemasyarakatan yang berada di wilayah itu guna melestarikan lingkungan yang terkoordinasi di tingkat kelembagaan komunitas akar rumput, baik itu sebelum atau sesudah terjadinya kerusakan lingkungan.

Institusi kemasyarakatan di tingkat akar rumput dalam hal pelestarian lingkungan sesungguhnya dapat menjadi aktor yang berperan vital dengan membentuk rangkaian jembatan yang berkonstruksi jaringan koordinasi pada institusi kemasyarakatan lokal lainnya. Pembangunan berkelanjutan menurut Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, 1987, adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, mutlak perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan. Manusia dan perilakunya merupakan faktor utama untuk memelihara keberadaan dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu peningkatan pendidikan dan peningkatan keterampilan profesi dari seluruh pelaku pembangunan perlu diutamakan.

Terlihat bahwa kurangnya peran institusi kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang lingkungan dari masyarakat di desa Pancana, kecamatan Tanete Rilau. Pendidikan memegang peran penting dalam pembinaan sumber daya manusia. Pendidikan lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, pemahaman,, sikap, dan kepekaan dalam berperilaku sebagai warga masyarakat yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan individu dan makhluk hidup lainnya, dan dalam bertindak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya (Anonim, 2004). Oleh karena itu dalam rangka terwujudnya lingkungan yang lestari maka penting sekali pendidikan lingkungan di segala sektor dan segala

jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal. Sebab pendidikan lingkungan tidak hanya diperlukan oleh beberapa institusi atau keahlian yang terkait langsung dengan pengelolaan lingkungan, tetapi dapat dikatakan bahwa pendidikan lingkungan diperlukan disemua institusi dan semua keahlian, dengan kadar yang berbeda-beda (Anonim, 2004).

Masih kurangnya keterlibatan institusi kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan di desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau menunjukkan pula bahwa pengelolaan lingkungan hidup belum merupakan kewajiban dari masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir desa Pancana. Padahal sebagai stake holder seharusnya institusi kemasyarakatan ini seyogyanya terlibat langsung baik secara berkelompok ataupun secara individu. Hal sesuai yang digariskan dalam hasil Lokakarya Pengembangan Konsep Kompetensi Sumberdaya Manusia di Bidang Lingkungan bahwa stake holder yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain adalah masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok.

Terlihat bahwa selain Majelis Ta'lim, kerjasama, solidaritas, kegiatan gotong royong diantara anggota institusi kemasyarakatan seperti kelompok tani, karang taruna, dan PKK semakin berkurang. Terdegradasinya hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya program, tidak terorganisir dengan baik institusi kemasyarakatan itu, lemahnya manajemen dan berdampak pada semakin berkurangnya kegiatan-kegiatan institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin melemahnya modal sosial diantara anggota dan pengurus institusi kemasyarakatan tersebut dan masyarakat desa pada umumnya. Menurut Putnam (2000), bahwa modal sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebab modal sosial membolehkan warga masyarakat untuk memecahkan permasalahan kolektif dengan mudah. Karena mungkin lebih baik memecahkan suatu masalah dengan jalan bekerjasama dimana setiap anggota masyarakat memberi kontribusi mereka pada pemecahan masalah tersebut. Dan lebih baik apabila pemecahan masalah tersebut melalui suatu mekanisme kelembagaan yang mempunyai kekuatan untuk menampung segala aspirasi untuk terjalannya perilaku bersama.

Ketika modal sosial mengacu pada institusi, hubungan dan norma-norma yang membentuk kuantitas dan kualitas dari suatu interaksi sosial didalam masyarakat. Maka modal sosial bukan hanya sebagai penjumlahan dari sejumlah institusi yang menjadi penyokong atau pondasi suatu masyarakat – namun juga menjadi lem yang menjaga kesatuan kebersamaan mereka (Bank Dunia, 1999). Hal ini seiring dengan meningkatnya bukti bahwa kohesi sosial adalah kritik masyarakat keberhasilan mereka baik secara ekonomi maupun untuk pembangunan yang berkelanjutan. Modal sosial merupakan kemampuan kerjasama menghadapi seluruh permasalahan, untuk mencapai tujuan dalam kelompok atau organisasi. Dan aset dari sebuah kecenderungan untuk aksi kolektif yang saling menguntungkan, dimana masyarakat diberkahi suatu keberagaman. Sehingga masyarakat yang memiliki sejumlah modal sosial memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam kerjasama yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Sedangkan masyarakat dengan tingkat modal sosial yang rendah adalah masyarakat yang kurang mampu mengorganisir diri mereka secara efektif (Putnam dkk., 1993 ; Putnam, 1995 ; Fukuyama 1995).

Demikian, menunjukkan bahwa belum berlangsungnya pelestarian lingkungan secara berkesinambungan oleh institusi kemasyarakatan itu disebabkan mulai terdegradasinya modal sosial di dalam institusi tersebut. Sebab suatu kelompok masyarakat atau institusi kemasyarakatan yang dibangun dengan modal sosial merupakan hasil dari pengembangan hubungan sosial aktif, partisipatif, dan menekankan pada rasa memiliki komunitas dan rasa saling percaya (Fukuyama, 1995).

Kurang berfungsinya organ-organ pemerintah desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimana organ tersebut sebagai tempat masyarakat berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam program pelestarian lingkungan disebabkan kurangnya program pelestarian lingkungan hidup pada organ-organ kemasyarakatan tersebut serta rendahnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam ikut berperan serta dalam pembuatan program pembangunan di desanya. Menurut Oakley (1991) menginterpretasikan bentuk partisipasi dalam pembangunan desa pada empat aspek. (1) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan program yang menguntungkan masyarakat, serta partisipasi dalam menilai keberhasilannya. (2) partisipasi dalam bentuk sumbangan sukarela kepada pihak lain untuk pembangunan atau mobilisasi dana. (3) partisipasi sebagai usaha terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan alokasi sumberdaya dalam kegiatan pemerintahan. (4) partisipasi advokasi untuk mempengaruhi arah dan kebijakan, program dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah daerah Barru melalui dinas-dinas terkait juga terlihat kurang dalam pelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya program-program pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Program penghijauan dengan penanaman kembali pohon mangrove melalui pelatihan pernah dilakukan tetapi hanya satu kali. Sedang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada tingkat kelompok tani sudah jarang berlangsung disebabkan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program penyuluhan semakin kurang di alokasikan dalam APBD setiap dinas terkait. Ditingkat aparat penyuluh pertanian lapangan semakin sedikit setelah adanya otonomi daerah, banyak diantara mereka yang telah beralih menjadi aparat struktural pada dinas terkait dan tidak lagi menjadi aparat fungsional dilapangan. Padahal program pemberdayaan ini sangat diperlukan sekali masyarakat untuk menambah wawasan mereka dalam menjaga pelestarian lingkungan dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penebangan hutan mangrove secara ilegal oleh masyarakat sekitar hutan.

Melalui program pemberdayaan oleh pemerintah daerah pada dasarnya akan banyak manfaatnya sebab pemberdayaan itu merupakan pemberian kontribusi terhadap pengembangan kemampuan masyarakat untuk menjamin tercapainya titik kemandirian mengaktualisasikan diri. Hal ini menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap dan asset yang dimiliki. Oleh Narayan (2002), secara sederhana pemberdayaan diartikan sebagai peningkatan aset dan kemampuan masyarakat marjinal untuk bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas pada kelembagaan yang mempengaruhi kehidupannya.

Kesimpulan

Peran dari berbagai kelembagaan lokal dalam pelestarian lingkungan di wilayah pesisir masih rendah seiring tidak terorganisirnya dengan baiknya institusi kemasyarakatan, tidak adanya program yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan di desa Pancana kecamatan Tanete Rilau. Ada kecenderungan di antara institusi kemasyarakatan yang ada untuk bersifat reaktif semata dalam pelestarian lingkungan ketika akan dilaksanakannya hari besar negara padahal masalah lingkungan sebenarnya perlu dilakukan secara rutin. Semakin melemahnya kerjasama diantara pengurus dan anggota pada sebahagian besar institusi kemasyarakatan membuat kegiatan gotong royong semakin berkurang dilakukan oleh masyarakat di desa Pancana. Semakin berkurangnya program-program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir oleh dinas-dinas kabupaten Barru yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup seiring pula dengan berkurangnya program desa yang terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkitson, R.L., Atkitson, R.C & Hilgard, E.R. (1993). *Intoduction to psychology*. 8th ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich Publisher.
- Bloom, B.S. (1964). *Taxonomy of educational objectivities the classification of education goals*. Handbook II: Affective Domain, New York & London: Longman, Inc.
- Bootzin, R.R., Loftus, E.F., & zajonc, R.B. (1983). *Psychology today an introduction*. (5th ed.) New York: Random House.
- Dahuri, R., Jacub R., Sapta P.G., & M.J. Sitepu, 2001. *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta : 328 hlm.
- FAO dan IIRR. 1995. *Pengolohan Sumber daya Laban Kering*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan.
- Faure, F., Herrera, F., Kaddoura, A.R., Lopes, H., Petrovsky, A.V., Rahmena, M., and Champion Ward, F (1972). *Learning to be, the world of education today and Tomorrow*. Paris & London: Unesco Harrap.
- Harger, J.R.E. (1993, Oktober). *Environmentally sound and sustainable (development)*. Makalah yang dibawakan dalam seminar PKLH, PPS IKIP Jakarta.
- Hillyng, J. (1993, Oktober). *Environmental and sustainable development*. Makalah yang dibawakan dalam seminar PKLH, PPS IKIP Jakarta.
- Knowles & Malcolm. (1977). *The modern practice of adult education*. New York: Assosiation Press.
- Lunandi, A. G. (1993). *Pendidikan orang dewasa*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Pomalingo. 2003. *Pengetahuan Lingkungan*. Edisi revisi, gorontalo: Konsorsium Perguruan Tinggi Kawasan Timur Indonesia.
- Rogers, C.R. (1980). *A way of being*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Salim, E. (1986) *Pembangunan berwawasan lingkungan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Sarwono, S.W. (1992). *Psikologi lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia. Makalah yang dibawakan dalam seminar PKLH, PPS IKIP Jakarta.
- Sastrawijaya, A.T. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Surabaya: Rineka Cipta.
- Semiawan, C. (1978). *Lingkungan belajar yang mengundang suatu pendekatan bermakna Dalam meningkatkan perkembangan anak retasdasi mental*. Disertasi : PPS IKIP Jakarta.
- Semiawan, C. & Raka Joni, T. (1993). *Pendekatan pembelajaran, acuan konseptual Pengelolaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhartono, S. (1994). *Filsafat ilmu pengetahuan*. Ujung Pandang: PPS Universitas Hasanuddin.
- Swan, J.A., & Stapp, W.B (1974). *Environmental education. Strategies toward a more Livable future*. New York: John Wiley & Sons co.